



# KABUPATEN POLEWALI MANDAR



# LAKIP 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam LAKIP ini dilaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen Renstra DP2KBP3A Tahun 2009-2024 dan Penetapan Kinerja DP2KBP3A Tahun 2021 untuk melihat sejauhmana strategi yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Polewali Mandar sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan DP2KBP3A.

LAKIP ini memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja DP2KBP3A sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD DP2KBP3A Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD DP2KBP3A sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Polewali, Maret 2022

Kepala DP2KBP3A

**H. AHMAD KILANG, S.Pd.MMA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681231 198803 1 190

# DAFTAR ISI



## Sampul

<i>i</i>	<i>Kata Pengantar.....</i>	<i>i</i>
<i>ii</i>	<i>Daftar Isi .....</i>	<i>ii</i>
<i>iii</i>	<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>iv</i>
<i>vi</i>	<i>Daftar Grafik.....</i>	<i>vi</i>

## Pendahuluan

<i>1.</i>	<i>Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>2.</i>	<i>Dasar Hukum.....</i>	<i>2</i>
<i>3.</i>	<i>Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja DP2KBP3A..</i>	<i>4</i>

## Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunandan Penetapan Kinerja

<i>32</i>	<i>Rencana Strategis.....</i>	<i>33</i>
<i>40</i>	<i>Visi dan Misi Bupati.....</i>	<i>40</i>
<i>41</i>	<i>Rencana Kerja Tahunan 2020.....</i>	<i>41</i>
<i>41</i>	<i>Penetapan Kinerja 2020.....</i>	<i>41</i>



Akuntabilitas Kinerja

44	<i>Akuntabilitas Kinerja.....</i>	43
78	<i>Akuntabilitas Keuangan .....</i>	72



Penutup

# Daftar Tabel

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Golongan, Keadaan Desember 2020.....	44
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Eselon dan fungsional, Keadaan Desember 2020.....	44
Tabel 1.3.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2020 .....	45
Tabel 1.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2020.....	45
Tabel 1.5.	Daftar Inventaris DP2KBP3A Keadaan Desember 2020.....	46
Tabel 1.6	Identifikasi Isu Isu Strategis Tahun 2016-2021.....	51
Tabel 1.7	Identifikasi Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	56

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Tabel 2.1.	Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan.....	61
Tabel 2.2.	Penetapan Kinerja DP2KBP3A 2019.....	67

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Tabel 3.1.	Indikator Capaian Kinerja DP2KBP3A.....	70
Tabel 3.2.	Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019–2020.....	71
Tabel 3.3.	Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.....	74
Tabel 3.4.	Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data yang dibentuk Tahun 2020.....	75
Tabel 3.5.	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2017-2020.....	77
Tabel 3.6.	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang belum terlayani (Unmet Need) Tahun 2018-2020.....	78
Tabel 3.7.	Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru tahun 2018-2020.....	79

Tabel 3.8.	Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP tahun 2018-2020.....	80
Tabel 3.9.	Perkembangan Peserta KB Aktif dari keluarga miskin (pra-s dan KS1 tahun 2018-2020.....	81
Tabel 3.10.	Nama nama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Wilayah Kerja Kabupaten Polewali Mandar 2020 .....	83
Tabel 3.11.	Frekwensi Operasional Tim KB Keliling Kcamatan Polewali Mandar Tahun 2020.....	87
Tabel 3.12	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Tahun 2018-2020.....	88
Tabel 3.13.	Perkembangan Anggota Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Tahun 2018-2020.....	90
Tabel 3.14.	Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Tahun 2018-2020 .....	91
Tabel 3.15.	Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB menjadi anggota UPPKS Tahun 2018-2020 .....	93
Tabel. 3.16.	Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif tahun 2020.....	96
Tabel 3.17.	Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan Gender.....	98
Tabel 3.18.	Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2020 .....	98
Tabel 3.19.	Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2020.....	101
Tabel 3.20.	Tingkat Kasus Kekerasan Anak tahun 2018-2020.....	102
Tabel 3.21.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya Kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak tahun 2020.....	103
Tabel 3.22	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 .....	107
Tabel 3.23	Akuntabilitas Keuangan menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan Gender tahun 2020.....	110

## Daftar Grafik dan Gambar

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019-2020.....	72
Gambar 3.2. Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur PUS Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2018–2020.....	78
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Tahun 2018–2020.....	79
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2018–2020..	80
Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif dari Keluarga Miskin (Pra-S dan KS 1) Tahun 2018–2020.....	82
Gambar 3.6. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahter (UPPKS).....	92
Gambar 3.7. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018–2020.....	99
Gambar 3.8. Gambar Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak .....	102
Gambar 3.9. Grafik Perkembangan Kasus Kekerasan Anak Tahun 2018–2020..	103

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggung jawabkan sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyusun pertanggungjawaban dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai media pertanggungjawaban mengenai kinerja DP2KBP3A sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja DP2KBP3A khususnya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (RENSTRA) DP2KBP3A Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja DP2KBP3A Tahun 2021 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.



## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2011 dan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah :

1. Untuk memaparkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran Renstra DP2KBP3A Tahun 2019-2024;
2. Untuk memaparkan realisasi pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja DP2KBP3A tahun 2021;
3. Sebagai pembandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja DP2KBP3A dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja DP2KBP3A di masa yang akan datang;

3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas P2KBP3A**

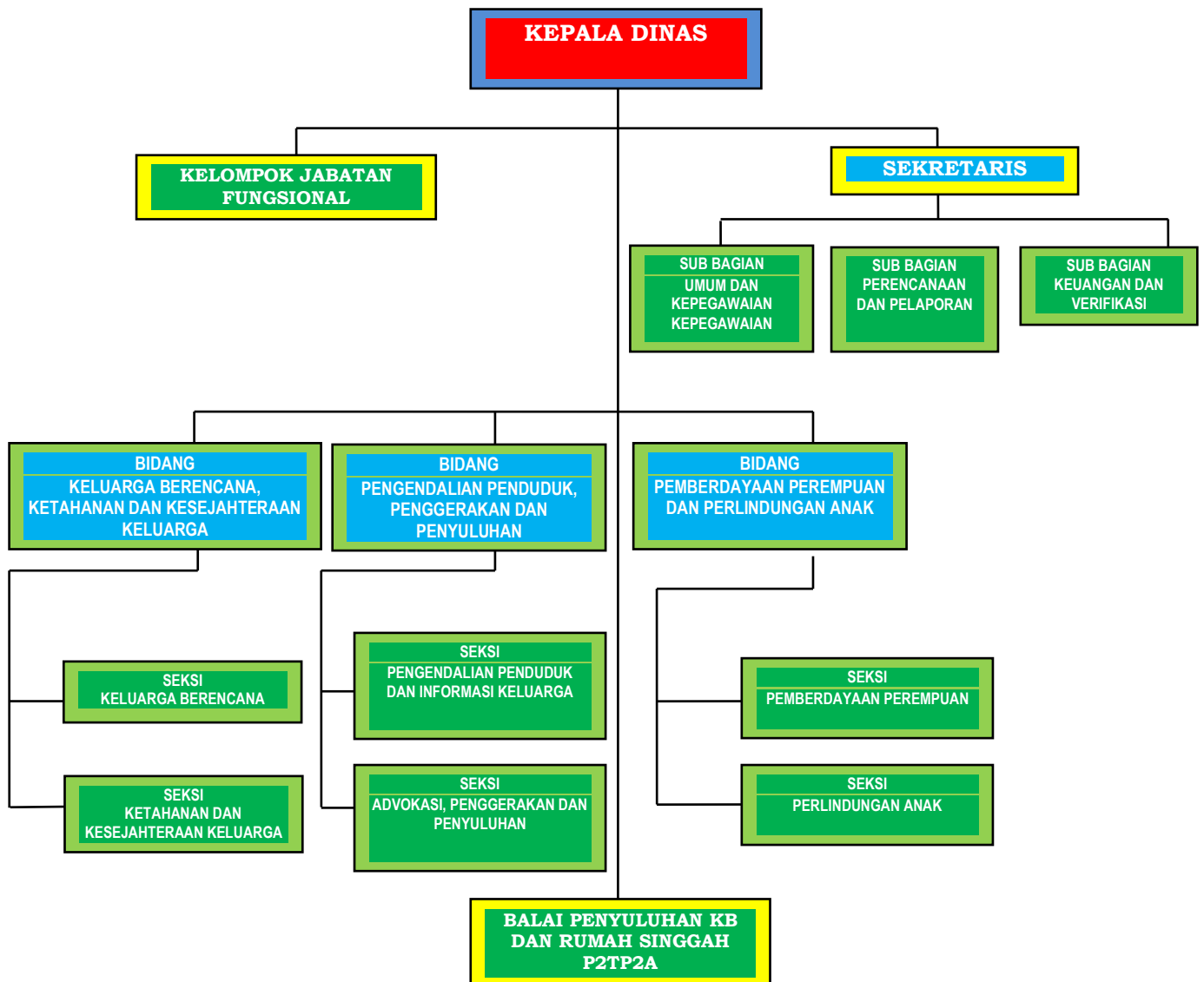
##### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PolewaliMandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 35 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub bagian Keuangan dan Verifikasi
- c. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan
  1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  2. Seksi Advokasi, KIE Penggerakan dan Penyuluhan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Seksi Keluarga Berencana
  2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  2. Seksi Perlindungan Anak
- f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar terlampir dihalaman selanjutnya:

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Uraian Tugas**

Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomer 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar berdasar Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar pada Bab IV pasal 3 di tetapkan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- 1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 2). Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi, dan
- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

- 1). Seksi Pengendalian Penduduk, dan informasi Keluarga
- 2). Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

**d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1). Seksi Keluarga Berencana
- 2). Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1). Seksi Pemberdayaan Perempuan dan
- 2). Seksi Perlindungan Anak

**f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan P2TP2A**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun yang menjadi Tupoksi masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**A. Kepala Dinas**

Tugas Pokok :

- (1) Membantu Bupati memelihara dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b) Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sekretaris**

Tugas Pokok :

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerjasi bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  - c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. Penyelenggaraan Perencanaan dan penganggaran;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  - f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  - i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
  - j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyelenggarakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
- d. Penyelenggaraan advokasi dan penggerakan dan penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis Pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Keluarga Berencana;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
    - a. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan;
    - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **G. Tata Kerja**

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
4. Kepala Dinas Wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

6. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
8. Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
9. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
10. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

**E. Kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)**

➤ **Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM Aparatur DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 28 orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris dinas, 3 orang kepala bidang, 9 orang kepala seksi, 23 orang Penyuluh KB dan JFU 10 orang, Tetapi pada bulan Oktober 2017 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana beralih ke Pusat sehingga terdiri dari 23 orang PLKB dan PKB yang telah mengikuti LDU (Latihan Dasar Kepemimpinan) beralih ke Pusat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang diuraikan berdasarkan Golongan Ruang, Eselon dan Fungsional, Pendidikan dan Diklat Kepemimpinan :

**Tabel 1.1**

**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Golongan Ruang, Keadaan Desember 2021**

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	-
II	-	3 orang	3 orang
III	4 orang	9 orang	14 orang
IV	3 orang	2 orang	5 orang
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>	<b>14 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepeg. DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar



**Tabel 1.2**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan**  
**Eselon dan Fungsional, Keadaan Desember 2021**

Eselon & Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II/b	1 orang	-	1 orang
III/a	1 orang	-	1 orang
III/b	1 orang	1 orang	2 orang
IV/a	-	1 orang	1 orang
JF Ahli	2 Orang	4 orang	6 orang
JFU	2 orang	8 orang	10 orang
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>	<b>15 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

**Tabel 1.3**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2021**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
SLTP	-	-	-
SLTA	-	2 orang	2 orang
D3	-	1 orang	1 orang
S1	2 orang	5 orang	7 orang
S2	5 orang	6 orang	11 orang
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>	<b>14 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

**Tabel 1.4**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2021**

Diklat Pim	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II	1 orang	-	1 orang
III	1 orang	1 orang	2 orang
IV	2 orang	2 orang	4 orang
<b>Jumlah</b>	<b>4 orang</b>	<b>3 orang</b>	<b>7 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Selain didukung sumber daya manusia yang memadai, DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar juga ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai yang selama ini diinventarisir dengan kondisi baik, antara lain sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.5**  
**Inventaris Barang DP2KBP3A, Keadaan Desember 2021**  
**BUKU INVENTARIS BARANG DP2KBP3A 2021**

No.	Nama	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1985	1	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1987	1	Baik
3	Sepeda Motor	2008	18	Baik
4	Papan Visuil	2010	1	Baik
5	Kursi Besi/Metal	2010	2	Baik
6	Meja Panjang	2010	1	Baik
7	Kursi Putar	2010	3	Baik
8	Kursi Putar	2010	1	Baik
9	Kipas Angin	2010	1	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010	1	Baik
11	Meja Kerja	2010	4	Baik
12	Sepeda Motor	2011	21	Baik
13	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2011	11	Baik
14	Kursi Putar	2011	1	Baik
15	Kursi Biasa	2011	29	Baik
16	Facsimile	2011	1	Baik

17	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	2011	1	Baik
18	Air Conditioning Unit	2012	5	Baik
19	Lemari Penyimpanan	2012	3	Baik
20	Rak Besi/Metal	2012	3	Baik
21	White Board	2012	3	Baik
22	Meja Rapat	2012	6	Baik
23	Kursi Rapat	2012	29	Baik
24	Kursi Putar	2012	8	Baik
25	Kursi Putar	2012	3	Baik
26	Kursi Biasa	2012	9	Baik
27	Meja Biro	2012	3	Baik
28	Lemari Es	2012	1	Baik
29	Kipas Angin	2012	9	Baik
30	Televisi	2012	2	Baik
31	Laptop	2012	3	Baik
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2012	2	Baik
33	Personal Komputer	2012	10	Baik
34	Meja Kerja	2012	16	Baik
35	Printer	2012	1	Baik
36	Dispencer	2012	1	Baik
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	3	Baik
38	Mesin Absensi	2013	1	Baik
39	Wireless	2013	1	Baik
40	Laptop	2013	1	Baik
41	Printer	2013	1	Baik
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	2	Baik
43	Sound System	2013	1	Baik
44	Personal Komputer	2013	17	Baik
45	Meja Kerja	2013	1	Baik
46	Meja Kerja	2013	1	Baik
47	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2013	3	Baik
48	Air Sumber Kapasitas Kecil	2013	4	Baik
49	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	2013	4	Baik
50	Papan Pengumuman	2014	1	Baik
51	Papan Tulis	2014	1	Baik
52	Publik Address (Lapangan)	2014	3	Baik
53	Personal Komputer	2014	1	Baik
54	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2014	3	Baik
55	Mobil Unit Penerangan	2015	1	Baik
56	Sepeda Motor	2015	6	Baik
57	Lemari Penyimpanan	2015	1	Baik
58	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2015	1	Baik

59	Kursi Tamu	2015	1	Baik
60	Sofa	2015	1	Baik
61	AC Split	2015	1	Baik
62	Lemari Penyimpanan	2016	4	Baik
63	Lemari Penyimpanan	2016	1	Baik
64	Papan Visuil	2016	2	Baik
65	Papan Visuil	2016	1	Baik
66	Papan Visuil	2016	5	Baik
67	Kipas Angin	2016	1	Baik
68	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2016	1	Baik
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	4	Baik
70	Mini Bus 14 seat	2017	1	Baik
71	Sepeda Motor	2017	10	Baik
72	Lemari Besi	2017	1	Baik
73	P.C Unit/ Komputer PC	2017	5	Baik
74	Telephone Mobile	2017	23	Baik
75	Tempat Tidur Pasien	2017	4	Baik
76	Fire Extinghuizer	2017	1	Baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	2	Baik
78	Lectop	2018	2	Baik
79	Smarthpone	2018	2	Baik
80	Mobil Pengantar Alkon	2018	1	Baik
81	Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Binuang	2018	1	Baik
82	Pengadaan Box Mobil Alokon	2018	1	Baik
84	Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Binuang	2018	1	Baik
85	Lemari	2018	1	Baik
86	Printer	2018	1	Baik
87	Layar Film/Projector	2019	10	Baik
88	Kursi Kerja	2019	1	Baik
89	Mesin Sisik Jari (Finger Print)	2019	1	Baik
90	Kursi Tamu	2019	1	Baik
91	Sepeda Motor	2020	2	Baik
92	Rak Kayu	2020	1	Baik
93	Papan Nama Instansi	2020	1	Baik
94	Personal Computer	2020	1	Baik
95	Laptop	2020	10	Baik
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	Baik
97	Air Conditioning (AC)	2020	2	Baik
98	Sepeda Motor	2021	3	Baik
99	Rak Besi	2021	2	Baik

100	Lemari Kaca	2021	3	Baik
101	LCD Projector/Infocus	2021	3	Baik
102	Vacum Cleaner (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
103	Meja Kerja Kayu	2021	3	Baik
104	Kursi Rapat	2021	13	Baik
105	A.C. Split	2021	4	Baik
106	Exhause Fan (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
107	Tangga Aluminium (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
108	Troli (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
109	Alat Pemadam/Portable (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
110	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2021	5	Baik
111	Antene VHF/FM Stationary (Balai KB)	2021	3	Baik
112	P.C Unit	2021	3	Baik
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	4	Baik
114	Modem	2021	3	Baik
115	Wireless Access Point	2021	3	Baik
116	Pallet	2021	1	Baik

Sumber : Bendahara Barang DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar 2021

Gedung Kantor DP2KBP3A yang sekarang, digunakan sejak tahun 2012, yang berada di jalan Andi Depu No. 117 Polewali *eks* gedung kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. DP2KBP3A, tadinya berkantor gabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2010-2011). Selain sarana gedung induk, DP2KBP3A dalam mendukung kinerja dan tugas pokoknya dilapangan, terdapat juga :

1. Balai Penyuluh KB terdiri atas Koordinator PLKB dan PLKB/PKB PNS dan Non PNS. Ada 16 unit Balai Penyuluh KB berada di 16 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Klinik KB Pemerintah melekat di Puskesmas di setiap kecamatan dan Klinik KB Swasta, yaitu : Klinik KB di PKM Binuang, Klinik KB di PKM Polewali, Klinik KB di PKM Pekkabata, Klinik KB di PKM Anreapi, Klinik KB di PKM Matakali, Klinik KB di PKM Pelitakan, Klinik KB di PKM Wonomulyo, Klinik KB di PKM Kebunsari, Klinik KB di PKM Mapilli, Klinik KB di PKM Batupanga, Klinik KB di PKM Campalagian, Klinik KB di PKM Katumbangan, Klinik KB di PKM Pambusuang, Klinik KB di PKM Tinambung, Klinik KB di PKM Limboro, Klinik KB di PKM Tutallu, Klinik KB di PKM Tutar, Klinik KB di PKM Matangnga, Klinik KB di PKM Bulu dan RSUD Polewali. Sedangkan Klinik KB Swasta, yaitu : Klinik KB Kemala, Klinik KB Maghfirah, Klinik KB Persit Candra Kirana, Klinik KB Mattirodeceng dan Klinik KB Mifta.
3. Gudang Alkon, di kompleks BTN Pembangunan Berlanjut Kelurahan Madatte Kec. Polewali.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Rumah Singgah yang berada di Kecamatan Matakali terdiri Pengelola, Konselor dan Tenaga Pendamping Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak

## F. ISU STRATEGIS

Untuk melakukan suatu sistem perencanaan yang strategis, suatu organisasi perlu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di daerah dengan metode analisis *SWOT*, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di DP2KBP3A yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di DP2KBP3A pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar DP2KBP3A sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019–2024. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Permasalahan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan suatu gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan tentunya hal ini juga masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi penyebab/menghambat pencapaian kinerja.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan pada DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk setiap bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi untuk menjawab pelaksanaan program KKB dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut:

#### **1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Manajemen penyediaan dan distribusi alokon;
- b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP;
- c. Pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja;
- d. Persebaran ratio PKB/PLKB di setiap Kecamatan;
- e. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera
- f. Pengembangan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS);
- g. Pemuktahiran Data Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);

- h. Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD);
  - i. Penguatan dan kualitas lini lapangan (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD, kader KB) termasuk mekanisme operasional;
  - j. Sistem pencatatan pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB;
  - k. Pelatihan Bidan khususnya Bidan Swasta untuk pemasangan IUD dan Implan;
  - l. Pelatihan Dokter khususnya Dokter Swasta untuk pemasangan MOW dan MOP;
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Penyediaan Sistem Informasi Gender dan Anak;
  - b. Penyediaan tenaga ahli dalam penanganan KDRT seperti : tenaga pendamping, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, tenaga sosial dan tenaga ahli lainnya;
  - c. Advokasi tentang kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. Advokasi penganggaran responsif gender dan anak;
  - e. Pendampingan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - f. Sistem pencatatan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
  - g. Pembentukan dan pengembangan forum anak;
  - h. Pengembangan Kabupaten Layak Anak

**Tabel 1.6 .  
Identifikasi Isu Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2016-2021**

<b>I BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN</b>		
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).	<p>Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai dan masih ada kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB</p> <p>Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah daerah tentang program Bangga kencana, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimasukkan dalam perencanaan daerah serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB</p> <p>Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah</p>
2	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	<p>Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif</p> <p>Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga kencana baik antara provinsi, antara wilayah pedesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga</p> <p>Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB</p>

		Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal
3	Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS	<p>Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan data dan informasi</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengolahan data</p> <p>Luasnya cakupan wilayah pendataan keluarga serta sulitnya akses menuju lokasi merupakan kendala sarana dan prasarana oleh para pengumpul data di lapangan</p> <p>Data sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB, namun data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan dan KB, belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Bangsa kencana, dikarenakan system pengolahan data masih kurang berkualitas</p>
<b>II</b>	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata	<p>Pemakaian kontrasepsi belum meningkat secara signifikan</p> <p>Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi</p> <p>Rendahnya pengguna MKJP</p> <p>Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/ klinik pelayanan KB</p> <p>Peran Bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal</p> <p>Kualitas penyuluh KB perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan</p> <p>Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan</p>
2	Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	<p>Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria)</p> <p>Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun</p> <p>Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi</p> <p>Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah</p>
3	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi	<p>Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah</p> <p>Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah</p>



keluarga	Kualitas hidup Lanjut Usia (Lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal
	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan/Poktan, yang terdiri dari ; Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)
	Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan

<b>III</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif, melalui; pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender; dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga	Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
	Memperkuat sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak melalui ketersediaan sistem data pilah gender dan anak, penigkatan kapasitas pengelola data melalui forum data	Meningkatkan sistem penyediaan, pemuktahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM pengelola Data dan penyediaan SIGA dan infrastruktur termasuk jaringan yang optimal dengan focus Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA
	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah melalui pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak melalui pencapaian kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten layak anak	

### Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

- **Dinamika Internasional :**

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah sebuah agenda integritas ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini sepuluh Negara anggota ASEAN memiliki :

- Populasi lebih dari 600 juta jiwa.
- Nilai perdagangan intra-ASEAN sekitar US\$ 600 milyar.
- Nilai perdagangan eksternal sekitar US\$ 1.800 milyar.
- Jumlah wisman diatas 35 juta orang/tahun.

Kawasan bebas perdagangan barang, modal dan jasa (12 sektor prioritas) untuk daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Menjadikan ASEAN sebagai basis **produksi dunia** serta menciptakan **pasar regional** bagi 575 juta jiwa penduduk ASEAN.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara ASEAN yang penduduknya paling banyak. Pada 2020, tercatat sebanyak lebih dari 270 juta jiwa menempati negara Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), berikut urutan negara dengan populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara pada tahun lalu.

1. Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa
2. Filipina, dengan jumlah penduduk mencapai 109.581.078 jiwa
3. Vietnam, dengan jumlah penduduk mencapai 97.338.579 jiwa
4. Thailand, dengan jumlah penduduk mencapai 69.799.978 jiwa
5. Myanmar, dengan jumlah penduduk mencapai 54.409.80 jiwa
6. Malaysia, dengan jumlah penduduk mencapai 32.366.00 jiwa
7. Kamboja, dengan jumlah penduduk mencapai 26.718.965 jiwa
8. Laos, dengan jumlah penduduk mencapai 7.275.56 jiwa
9. Singapura, dengan jumlah penduduk mencapai 5.850.342 jiwa
10. Brunei Darrusalam, dengan jumlah penduduk mencapai 437.48 jiwa

#### **Dinamika Nasional :**

- Nawacita, Sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakkan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform. BKKBN mendukung agenda prioritas No.5 yaitu ;**Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia** melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program Bangga kencana di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program Bangga kencana untuk periode 2015-2019, salah satu diantaranya adalah adanya **Pembentukan Kampung KB** dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga kencana secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan.

- **Dinamika Regional/ Lokal :**

- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pembangunan infrastruktur belum memadai.

- Pengembangan ekonomi kerakyatan.
- Pengelolaan sumber daya alam & lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang cukup tentang pencapaian Program Bangga kencana di Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2019-2024, dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

(memuat Latar Belakang yang menjelaskan tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan dan juga mengenai Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi yang memuat penjelasan umum tentang organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi).

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

(memuat Rencana Strategis yang menjelaskan tentang Renstra DP2KBP3A, visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja Utama/sasaran dalam Renstra DP2KBP3A) dan juga mengenai Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang memuat Target Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021)

### **BAB III. AKUNTABILITAS**

(Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja pertujuan, persasaran dan perindikator sasaran. Dan untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021, membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, menguraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan dan Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Dan juga penjelasan mengenai Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja)

### **BAB IV. PENUTUP**

(memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa datang organisasi)

### **Lampiran**

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja tahun 2021
- Realisasi Anggaran Tahun 2021

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

##### A. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

##### B. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota

##### C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok)

Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta hak hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan : Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan ketahanan keluarga Kesertaan Ber-KB

#### D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKLPPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKLPPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKLPPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

#### E. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal

Sub Kegiatan : Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Sub Kegiatan : Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

#### F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN : 2019 - 2024																
Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan													
		2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan				1 IPG	91.75%	606,342,000.00	92.81%	613,000,000.00	92.27%	633,000,000.00	92.54%	661,000,000.00	92.00%	664,000,000.00	93.10%	664,000,000.00
				2 Predikat kabupaten layak anak	Pratama		Pratama		Madya		KLA		KLA		KLA	
Meningkatnya kesetaraan gender dan keadilan gender				1 IPG	91.75%	404,000,200.00	92.81%	400,000,000.00	92.27%	422,000,000.00	92.54%	440,000,000.00	92.00%	455,000,000.00	93.10%	455,000,000.00
		1.3.1.15	Program Pemberdayaan Perempuan	1 IPG	91.75%	404,000,200.00	92.81%	400,000,000.00	92.27%	422,000,000.00	92.54%	440,000,000.00	92.00%	455,000,000.00	93.10%	455,000,000.00
		1.3.1.15.1	Evaluasi PUG	1 Jumlah Peserta evaluasi PUG	20 orang	27,268,200.00	25 orang	28,631,610.00	30 orang	30,063,191.00	35 orang	31,566,350.00	40 orang	33,144,668.00	40 orang	33,144,668.00
		1.3.1.15.2	Peningkatan peran serta OPD dalam pelaksanaan PPRG	1 Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	10 Jumlah	27,540,000.00	10 Jumlah	28,917,000.00	10 Jumlah	30,362,050.00	10 Jumlah	31,880,963.00	10 Jumlah	33,475,042.00	10 Jumlah	33,475,042.00
		1.3.1.15.3	Penguatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	1 jumlah PKK yang diberdayakan	350 Jumlah	350,000,000.00	350 Jumlah	351,451,300.00	350 Jumlah	361,573,950.00	350 Jumlah	376,552,657.00	350 Jumlah	388,380,290.00	350 Jumlah	388,380,290.00
Meningkatnya kualitas Hidup Anak				2 Predikat kabupaten layak anak	Pratama	291,534,000.00	Pratama	294,000,000.00	Madya	211,000,000.00	KLA	221,000,000.00	KLA	229,000,000.00	KLA	229,000,000.00
		1.3.1.16	Program Perlindungan Anak	1 Predikat kabupaten layak anak	Pratama	291,534,000.00	Pratama	294,000,000.00	Madya	211,000,000.00	KLA	221,000,000.00	KLA	229,000,000.00	KLA	229,000,000.00
		1.3.1.16.1	Facilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibalasi	35 jumlah	77,546,000.00	35 jumlah	81,423,300.00	35 jumlah	85,494,465.00	35 jumlah	89,769,188.00	35 jumlah	94,257,647.00	35 jumlah	94,257,647.00
		1.3.1.16.2	Pelaksanaan forum desa layak anak	1 Jumlah desa layak anak yang dilaksanakan	130 Jumlah	123,988,400.00	140 Jumlah	122,576,700.00	150 Jumlah	125,505,535.00	160 Jumlah	131,230,812.00	170 Jumlah	134,742,353.00	170 Jumlah	134,742,353.00
		2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas				1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%		1.12%		1.82%		0.92%		0.82%		0.72%	
				1 Persentase peserta KB aktif	71%	6,997,964,400.00	74%	7,970,000,000.00	77.63%	7,290,000,000.00	80.99%	7,614,000,000.00	84.27%	7,675,000,000.00	86.27%	7,675,000,000.00
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk				1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%	250,000,000.00	1.12%	255,000,000.00	1.82%	264,000,000.00	0.92%	276,000,000.00	0.82%	286,000,000.00	0.72%	286,000,000.00
		1.1.1.15	Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%	250,000,000.00	1.12%	255,000,000.00	1.82%	264,000,000.00	0.92%	276,000,000.00	0.82%	286,000,000.00	0.72%	286,000,000.00

		1.1.1.15.1	Sosialisasi materi kependudukan sesuai dengan kearifan lokal	1 Jumlah Sosialisasi materi kependudukan yang diadakan	3 Jumlah	51,000,000.00	4 Jumlah	52,050,000.00	5 Jumlah	54,632,500.00	6 Jumlah	57,385,125.00	6 Jumlah	60,254,380.00	6 Jumlah	60,254,380.00
		1.1.1.15.2	Penyediaan informasi dampak kependudukan dan pengadain media	1 Jumlah jenis informasi yang disediakan	2 Jenis	14,300,000.00	2 Jenis	13,515,000.00	2 Jenis	14,190,750.00	2 Jenis	14,900,287.00	2 Jenis	15,645,310.00	2 Jenis	15,645,310.00
		1.1.1.15.3	Pengelolaan data dan informasi program berbasis keluarga	1 Jumlah dokumen data dan informasi yang dikelola	4 Jumlah	35,200,000.00	5 Jumlah	35,460,000.00	5 Jumlah	33,483,000.00	5 Jumlah	33,957,150.00	5 Jumlah	31,855,000.00	5 Jumlah	31,855,000.00
		1.1.1.15.4	Peningkatan kemitraan dalam pengendalian pelaksanaan program	1 jumlah mitra yang terlibat	160 Jumlah	45,500,000.00	170 Jumlah	50,475,000.00	180 Jumlah	52,998,750.00	190 Jumlah	55,648,588.00	200 Jumlah	58,431,122.00	200 Jumlah	58,431,122.00
		1.1.1.15.5	Pergerakan keluarga berencana bagi keluarga miskin	1 Jumlah keluarga miskin yang diberikan penyuluhan	500 jumlah	100,000,000.00	500 jumlah	103,500,000.00	500 jumlah	108,675,000.00	500 jumlah	114,108,750.00	500 jumlah	119,614,188.00	500 jumlah	119,614,188.00
	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi</b>			<b>1 Persentase peserta KB aktif</b>	<b>71%</b>	<b>6,747,064,400.00</b>	<b>74%</b>	<b>6,815,000,000.00</b>	<b>77.63%</b>	<b>7,034,000,000.00</b>	<b>80.99%</b>	<b>7,338,000,000.00</b>	<b>84.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>	<b>86.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>
		1.2.1.16	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>1 Persentase peserta KB aktif</b>	<b>71%</b>	<b>6,747,064,400.00</b>	<b>74%</b>	<b>6,815,000,000.00</b>	<b>77.63%</b>	<b>7,034,000,000.00</b>	<b>80.99%</b>	<b>7,338,000,000.00</b>	<b>84.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>	<b>86.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>
		1.2.1.16.1	Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesetiaan ber KB	1 Jumlah PUS yang menerima layanan KB	37 jumlah	30,190,000.00	41 jumlah	31,689,500.00	45 jumlah	33,284,475.00	49 jumlah	34,948,699.00	53 jumlah	36,696,134.00	53 jumlah	36,696,134.00
		1.2.1.16.2	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	1 Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan	5 jenis	6,408,715,000.00	5 jenis	6,512,233,130.00	5 jenis	6,716,094,786.00	5 jenis	7,004,199,525.00	5 jenis	7,238,509,502.00	5 jenis	7,238,509,502.00
		1.2.1.16.3	Pembinaan kader kelompok keluarga berencana	1 Jumlah kader kelompok KB yang dibina	30 Jumlah	222,853,400.00	30 Jumlah	233,996,070.00	30 Jumlah	245,695,674.00	30 Jumlah	257,986,967.00	30 Jumlah	270,679,700.00	30 Jumlah	270,679,700.00
		1.2.1.16.4	Pembinaan ketahanan keluarga	1 Jumlah keluarga yang dibina	40 Jumlah	35,306,000.00	45 Jumlah	37,071,300.00	50 Jumlah	38,924,865.00	50 Jumlah	40,671,108.00	50 Jumlah	42,914,664.00	50 Jumlah	42,914,664.00
		1.2.1.16.5	Pembinaan keluarga balita dan anak	1 Jumlah keluarga balita dan anak yang diberi pembinaan	125 jumlah	50,000,000.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00
	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder</b>	<b>Baik</b>	<b>146,000,000.00</b>	<b>Baik</b>	<b>353,300,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>400,773,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>465,913,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>519,363,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>519,363,000.00</b>
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja</b>			<b>Preskbut SAKIP perangkat daerah</b>	<b>B</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>BB</b>	<b>10,129,000.00</b>	<b>BB</b>	<b>10,939,000.00</b>	<b>A</b>	<b>12,679,000.00</b>	<b>A</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>A</b>	<b>13,819,000.00</b>
		1.4.1.1	<b>Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun sesuai Standar dan Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat</b>	<b>99%</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,129,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,939,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>12,679,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>13,819,000.00</b>
		1.4.1.1.1	Penyusunan Rencana / Perubahan Rencana Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana / Perubahan Rencana yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	1 jumlah	10,000,000.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00
		1.4.1.1.2	Penyusunan Rencana / Perubahan Rencana Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana / Perubahan Rencana tahunan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	1 jumlah	4,000,000.00	1 jumlah	4,000,000.00
		1.4.1.1.3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	1 jumlah dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	5,000,000.00	2 Dokumen	5,160,000.00	2 Dokumen	5,381,000.00	2 Dokumen	5,019,000.00	2 Dokumen	5,019,000.00



		1.4.1.1.4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1 jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00		
		1.4.1.1.5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	5,129,000.00	0 Dokumen	5,779,000.00	0 Dokumen	6,698,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00
		1.4.1.1.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	1 jumlah LPPD dan laporan pertanggungjawaban bupati/pada perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		1.4.1.1.7	Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	1 Dokumen Laporan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan</b>		<b>Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>1,934,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>2,364,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>2,364,000.00</b>
		1.4.1.2	<b>Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyampaian SPM sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>88.89%</b>		<b>91.11%</b>		<b>93.33%</b>		<b>95.56%</b>		<b>97.78%</b>		<b>97.78%</b>	
				<b>Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,934,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,364,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,364,000.00</b>
				<b>Persentase Penyampaian Laporan Aset sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>88.89%</b>		<b>91.11%</b>		<b>93.33%</b>		<b>95.56%</b>		<b>97.78%</b>		<b>97.78%</b>	
		1.4.1.2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jumlah SPM yang diterbitkan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		1.4.1.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Trwulan dan semesteran)	1 jumlah dokumen laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		1.4.1.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	0 jumlah	0,00	1 jumlah	1,071,000.00	1 jumlah	1,434,000.00	1 jumlah	1,934,000.00	1 jumlah	2,364,000.00	1 jumlah	2,364,000.00
		1.4.1.2.4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	1 Jumlah dokumen barang/aset daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 jumlah	0,00	0 jumlah	0,00	1 jumlah	0,00	0 jumlah	0,00	0 jumlah	0,00	0 jumlah	0,00
	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Stakeholder</b>		<b>Baik</b>	<b>336,800,000.00</b>	<b>Baik</b>	<b>342,700,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>388,400,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>451,900,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>504,580,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>504,580,000.00</b>
		1.4.1.3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase Tertib Ketidabsahaan Kantor	65%		70%		75%		80%		85%		85%	
				Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik	75%	336,800,000.00	73%	342,700,000.00	75%	388,400,000.00	77%	451,900,000.00	80%	504,580,000.00	80%	504,580,000.00
				Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik	75%		80%		80%		85%		85%		85%	
		1.4.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk dan keluar yang berkelola	20 surat	21,096,000.00	20 surat	20,517,000.00	20 surat	30,775,500.00	20 surat	43,896,000.00	20 surat	45,500,000.00	20 surat	45,500,000.00
		1.4.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 Jumlah	15,900,000.00	12 Jumlah	15,900,000.00	12 Jumlah	16,818,000.00	12 Jumlah	17,540,000.00	12 Jumlah	18,200,000.00	12 Jumlah	18,200,000.00
		1.4.1.3.3	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peralengkapan Kantor	1 Jumlah jasa perlatan kantor dalam kondisi baik	0 Jenis/bu	0,00	0 Jenis/bu	0,00	0 Jenis/bu	0,00	0 Jenis/bu	0,00	0 Jenis/bu	0,00	0 Jenis/bu	0,00

1.4.1.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/	1 Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	77 unit	18,160,000.00	73 unit	18,160,000.00	73 unit	20,353,100.00	73 unit	21,228,000.00	73 unit	29,000,000.00	73 unit	29,000,000.00
1.4.1.3.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Administrasi pelayanan keuangan yang baik	0 Orang/a dn	0.00	0 Orang/a dn	0.00	0 Orang/a dn	0.00	0 Orang/a dn	0.00	0 Orang/a dn	0.00	0 Orang/a dn	0.00
1.4.1.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Lantai gedung dan halaman kantor kondisi bersih	2 Jenis	12,561,200.00	2 Jenis	11,996,500.00	2 Jenis	12,550,000.00	2 Jenis	13,100,000.00	2 Jenis	13,558,500.00	2 Jenis	13,558,500.00
1.4.1.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	17,746,400.00	40 jenis	17,746,400.00	40 jenis	18,000,000.00	40 jenis	18,774,000.00	40 jenis	26,500,000.00	40 jenis	26,500,000.00
1.4.1.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	14,629,400.00	3 jenis	14,629,400.00	3 jenis	17,500,000.00	3 jenis	20,450,000.00	3 jenis	24,500,000.00	3 jenis	24,500,000.00
1.4.1.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00
1.4.1.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00
1.4.1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 jumlah makan minum yang tersedia	2 Jenis	42,300,000.00	2 Jenis	42,300,000.00	2 Jenis	46,530,000.00	2 Jenis	51,400,000.00	2 Jenis	61,000,000.00	2 Jenis	61,000,000.00
1.4.1.3.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	21 kali	94,272,800.00	20 kali	105,897,000.00	29 kali	128,585,400.00	30 kali	130,682,200.00	33 kali	132,133,250.00	33 kali	132,133,250.00
1.4.1.3.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22 kali	8,900,000.00	25 kali	8,900,000.00	30 kali	9,300,000.00	35 kali	10,350,000.00	40 kali	14,000,000.00	40 kali	14,000,000.00
1.4.1.3.16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00
1.4.1.3.17	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	1 jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00	0 jenis	0.00
1.4.1.3.18	Pembangunan Gedung Kantor	1 jumlah dan luas gedung kantor yang di bangun	0 unit/m2	0.00	0 unit/m2	0.00	0 unit/m2	0.00	0 unit/m2	0.00	0 unit/m2	0.00	0 unit/m2	0.00
1.4.1.3.19	Pengadaan Mebelur	1 jumlah jenis mebelur	1 Jenis	3,500,000.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00	0 Jenis	0.00
1.4.1.3.20	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	1 Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	1 jumlah	7,522,500.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00
1.4.1.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	1 Jumlah unit komputer PC/notebook	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	2 jumlah	17,815,800.00	2 jumlah	17,815,800.00
1.4.1.3.23	Pereliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Lantai bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	42 meter	18,723,200.00	42 meter	18,137,000.00	0 meter	0.00	42 meter	20,000,000.00	42 meter	20,700,000.00	42 meter	20,700,000.00
1.4.1.3.25	Pereliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	2 jenis	62,371,000.00	2 jenis	61,916,700.00	2 jenis	64,085,000.00	2 jenis	67,000,000.00	2 jenis	70,500,000.00	2 jenis	70,500,000.00
1.4.1.3.27	Pereliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah jenis peralatan yang terpelihara	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	6 jumlah	3,780,000.00	6 jumlah	3,969,000.00	6 jumlah	4,167,450.00	6 jumlah	4,167,450.00
1.4.1.3.28	Pereliharaan Rutin/Berkala Mebelur	1 Jumlah jenis mebelur yang terpelihara	0 Ubah	0.00	0 Ubah	0.00	0 Ubah	0.00	0 Ubah	0.00	0 Ubah	0.00	0 Ubah	0.00
1.4.1.3.30	Pengelolaan Informasi, pengadaan dan asosiasi publik	1 Jumlah jenis layanan yang dikelola	3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,525,500.00	3 jenis	7,200,000.00	3 jenis	7,200,000.00
1.4.1.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	30 jumlah	13,483,000.00	30 jumlah	14,062,800.00	30 jumlah	14,555,000.00	30 jumlah	14,555,000.00
1.4.1.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	1 Jumlah pegawai yang menyelesaikan pendidikan, pelatihan	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00



Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategis pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra DP2KBP3A mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan sasaran yang akan menjadi tolak ukur dalam penyusunan LAKIP DP2KBP3A.

Penyusunan LAKIP DP2KBP3A tahun 2021 ini merupakan pengukuran tahun kedua dari perencanaan strategis DP2KBP3A yang tertuang dalam dokumen Renstra DP2KBP3A tahun 2019-2024. Penilaian dan evaluasi terhadap akuntabilitas dan kinerja terhadap pencapaian hasil DP2KBP3A tahun 2021.

Perumusan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2019-2024.

Visi Bupati Polewali Mandar pada RENSTRA –SKPD tahun 2019-2024 adalah :

**Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**

Makna dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
<b>Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera</b>	Polewali Mandar MAJU	Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain

	Rakyat SEJAHTERA	Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas
--	------------------	---

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Misi Kabupaten Polewali Mandar**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Keempat misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dimana dalam setiap tujuan akan dicapai program kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari keempat misi tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DP2KBP3A tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Polewali Mandar Tahun 2020. Adapun Rencana Kinerja Tahunan DP2KBP3A Tahun 2021 yang terdiri dari 3 tujuan, 7 sasaran dan 11 indikator sasaran, sebagaimana terlampir.

#### **B. Penetapan Kinerja Tahun 2021**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi/unit kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Target 2021</b>
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum	- Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Sangat Baik
		- Predikat SAKIP Rata-rata Perangkat Daerah	BB	A
		- Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesadaran Terhadap Kesehatan Reproduksi	- Persentase Peserta KB Aktif	74 %	77,63 %
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	- Laju Pertumbuhan Penduduk	1,12 %	1,02 %
4	Menurunnya Kasus Kesekerasan Terhadap PA dan Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	- IPG	92,01 %	92,27 %
		- Predikat Kabupaten Layak Anak	Inisiasi	Pratama

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.671.773.808	DAU
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.875.427.000	DAU/DAK

3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	415.251.000	DAU
4.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	244.240.000	DAU
5.	Program Pengendalian Penduduk	101.000.000	DAU
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 9.307.691.808</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi DP2KBP3A.

#### **A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Kemudian, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran strategis, faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja dan penyebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

##### **1. Sasaran 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Indikator Capaian Kinerja Terkendalinya DP2KBP3A**



NO	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5
1	Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,12%	1,85%	0,73%
2	Presentase peserta KB aktif	74%	79,01%	106%
3	Indeks Pembangunan Gender	92,01	91,56%	0,45%
4	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama
5	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Baik	Baik
6	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
7	Opini Pengelolaan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP

Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran nomor 1 adalah bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan sedangkan sasaran nomor 2 adalah bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan. Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi materi kependudukan yang diadakan di SSK

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran dimana didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana

Materi Kependudukan Diintegrasikan Dengan Mata Pelajaran Sesuai Dengan Pokok Bahasan Sehingga Bukan Mata Pelajaran Baru, Tidak Menambah Jam Pelajaran, Tidak Mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar Namun Justru Mempertajam Materi Yang Dibahas Program SSK Menjadi Wadah Bagi Program-program Yang Digulirkan Bkkbn Seperti Pik Remaja, Genre Goes To School, Dan Lain-lain. Sehingga Dapat Berjalan Berdampingan Dan Simultan

Program SSK Berbasis Kurikulum Nasional Sehingga Tidak Akan Ada Perbedaan Karakteristik Wilayah Baik Secara Geografis maupun Administratif Program SSK bersifat gradual karena meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan Program SSK ini akan konsisten karena akan terus dilaksanakan selama mata pelajaran dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum

Data Kependudukan yang diobservasi, dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dikomunikasikan oleh para siswa adalah data kependudukan tempat tinggal para siswa sendiri sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggungjawab terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan semenjak tahun 2019.

Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang sudah tersosialisasi pada tahun 2021 sebanyak 5 sekolah sementara di tahun sebelumnya 2019 sebanyak 3 dan tahun 2020 sebanyak 4 sekolah hal ini berarti ada peningkatan 1 sekolah di tahun 2021. Terkait dengan indikator ini perkembangan dan realisasi cakupan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2018 dan 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

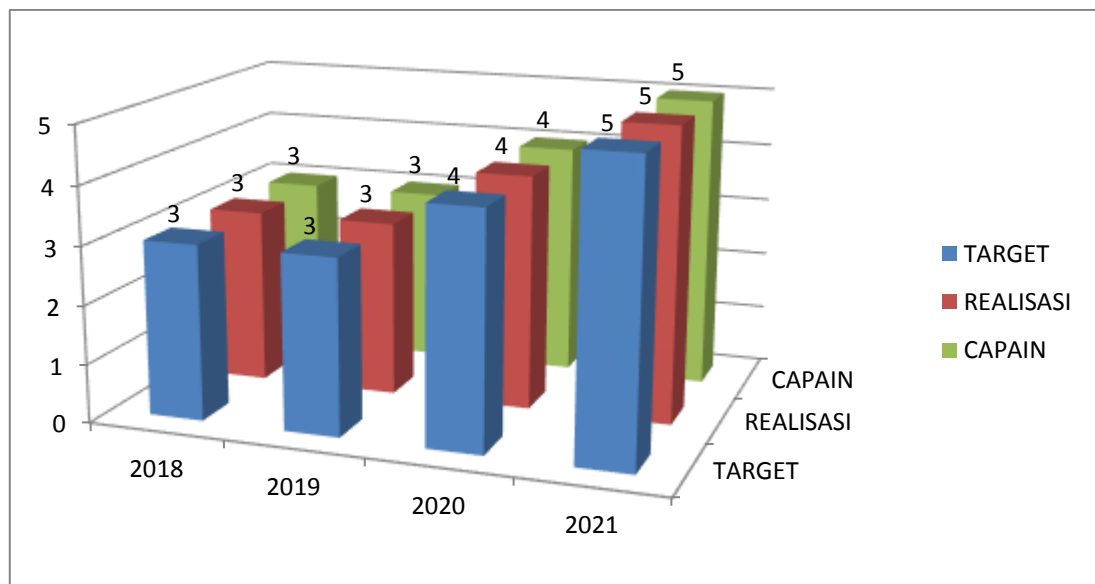
Tabel 3.2

Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah siaga kependudukan Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	3 SSK	3 SSK	100%
2019	3 SSK	3 SSK	100%
2020	4 SSK	4 SSK	100%
2021	5 SSK	5 SSK	100%

Gambar 3.1

Grafik Perkembangan Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) Tahun 2018-2021



## **2. Informasi dampak kependudukan dan pengadaan media KIE**

Informasi dampak kependudukan adalah informasi mengenai Perubahan jumlah penduduk ini ditentukan oleh komponen-komponen kependudukan, seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Penduduk besar akan memberikan dampak positif jika SDM-nya berkualitas, tetapi akan berdampak negatif kalau penduduk tidak berkualitas, sehingga menjadi beban pembangunan

## **3. Dokumen data dan Informasi yang dikelola**

Dokumen data dan informasi yang di kelola meliputi :

- a. Angka kelahiran total Kabupaten
- b. Angka Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Usia Subur
- c. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- d. Angka kebutuhan KB PUS yang belum termenuhi (Unmet need) seluruh Kabupaten Polewali mandar
- e. Angka pemakaian KB cara modern menurut karakteristik latar belakang di Kabupaten Polewali mandar
- f. Angka PUS Kabupaten Polewali mandar
- g. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- h. Angka peserta KB Aktif seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- i. Angka peserta KB Baru per mix kontrasepsi seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- j. Presentase peserta KB Aktif MKJP Kabupaten Polewali mandar
- k. Tren Angka PUS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- l. Tren pencapaian peserta KB Baru seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- m. Tren peserta KB Aktif MKJP seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- n. Tren Unmet Need Kabupaten Polewali mandar
- o. Data Basis kelompok BKB seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- p. Data Basis kelompok BKB HI se- Kabupaten Polewali mandar
- q. Data Basis kelompok BKR seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- r. Data Basis kelompok BKL seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- s. Data Basis kelompok UPPKS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- t. Data Basis kelompok PIK R seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- u. Jumlah Kelompok Tribina dan PIK R
- v. Jumlah Keluarga berdasarkan indikator perumahan atap terluas

- w. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan dinding rumah terluas
- x. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan lantai rumah terluas
- y. Angka Kelahiran per kelompok umur (ASFR)
- z. Presentasi Angka ketidak berlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Polewali mandar
- aa. Data PKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- bb. Data PLKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- cc. Data Kampung KB Kabupaten Polewali mandar

#### **4. Jumlah Mitra yang terlibat dalam Program Bangga Kencana (KKBPK)**

##### **Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)**

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader IMP (institusi Masyarakat Pedesaan) yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan. Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan program KB di Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD.

Cakupan pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) merupakan jumlah Desa/Kel dibandingkan jumlah PPKBD di setiap Desa/Kel. Sejak tahun 2014, setiap Desa/Kel memiliki 1 (satu) orang PPKBD.

Jumlah PPKB yang ada di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Laporan Pengendalian Lapangan Bulan Desember 2021 adalah 167 orang dan Sub PPKB berjumlah 728 orang

Tabel 3.3

Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

**Keadaan Umum**

NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH LAPOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	16	16
2	PPLKB / Petugas KB Kecamatan	19	19
3	Desa/Kelurahan	167	167
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	22	22
5	P P K B D	167	167
6	Sub P P K B D	728	728
7	Kelompok KB	66	66
8	Kelompok Kegiatan BKB	98	98
9	Kelompok Kegiatan BKR	17	17
10	Kelompok Kegiatan BKL	33	33
11	Kelompok Kegiatan UPPKS	49	49
12	Jumlah PIK R/M	25	25
	a. Jumlah PIK R/M Tumbuh	23	23
	b. Jumlah PIK R/M Tumbuh	2	2
	c. Jumlah PIK R/M Tumbuh	0	0

Tabel 3.4

Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data  
yang dibentuk Tahun 2021

**5. Jumlah Rumah Data Kampung KB yang dibentuk**

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN	RUMAH DATA
1	Polewali	Polewali	Ada
2	Takatindung	Polewali	
3	Madatte	Polewali	
4	Manding	Polewali	Ada
5	Sulewattang	Polewali	
6	Tonyaman	Binuang	Ada
7	Kunyi	Anreapi	Ada
8	Duampanua	Anreapi	Ada
9	Tonrolima	Matakali	Ada
10	Bunga bunga	Matakali	Ada
11	Indo Makombong	Matakali	Ada
12	Patampanua	Matakali	Ada
13	Tumpiling	Wonomulyo	Ada
14	Nepo	Wonomulyo	
15	Sidorejo	Wonomulyo	Ada
16	Jambu Malea	Tapango	Ada
17	Bussu	Tapango	

18	Buku	Mapili	
19	Sattoko	Mapili	
20	Kurma	Mapili	
21	Pulliwa	Bulo	Ada
22	Mambu Tapua	Matangnga	
23	Tapua	Matangnga	Ada
24	Taramanu	Tutar	
25	Taramanu Tua	Tutar	
26	Arabua	Tutar	Ada
27	Puccadi	Luyo	
28	Tenggelang	Luyo	
29	Luyo	Luyo	
30	Sumarrang	Campalagian	Ada
31	Kenje	Campalagian	Ada
32	Katumbangan Lemo	Campalagian	Ada
33	Padang Timur	Campalagian	Ada
34	Sabang subik	Balanipa	Ada
35	Lambanan	Balanipa	
36	Pambusuang	Balanipa	
37	Bala	Balanipa	Ada
38	Lego	Balanipa	Ada
39	Lekopadis	Tinambung	
40	Tangnga Tangga	Tinambung	
41	Sepabatu	Tinambung	Ada
42	Salarri	Limboro	Ada
43	Tangan Baru	Limboro	Ada
44	Sama sundu	Limboro	Ada
45	Alu	Alu	

## 2. Sasaran 2 : PRESENTASE PESERTA KB AKTIF

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

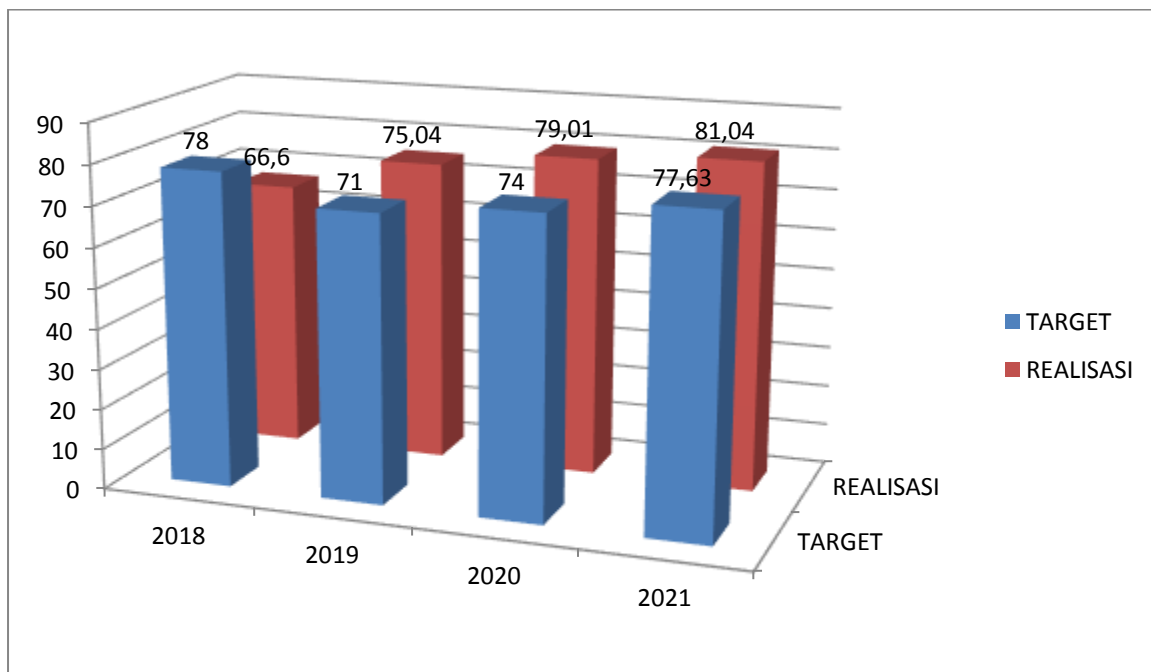
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif pada tahun 2021 sebesar 81.04% dari target 77.63 Hal ini berarti ada **peningkatan** sebesar 4.3%. Pada tahun 2020 meningkat 7 % dari target 74% menjadi 79.01%. Tahun 2019 meningkat 04,4% dari target 71% menjadi 75,4%. Hasil

perhitungan semakin tinggi semakin baik. Terkait dengan perkembangan/trend realisasi cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif tahun 2018-2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.5  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	78	66,6	85
2019	71	75,4	104,4
2020	74	79,01	107
2021	77,63	81,04	104,3

Gambar 3.1  
Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2018-2021



### Jumlah Unmet Need

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut

*Unmet Need* dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak inginpunya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.

Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

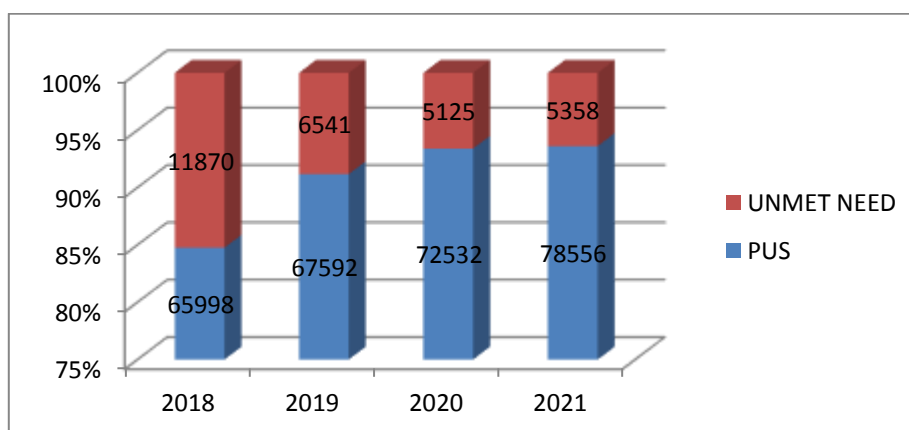
Unmet Need pada tahun 2021 sebesar 5.358 terhadap PUS sebanyak 72.532 dengan capaian penurunan 7,06%. Pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 5.125 orang terhadap PUS sebanyak 72.532 orang dengan capaian sebesar 7,06 % dan di tahun 2019 sebesar 6.541 orang terhadap PUS sejumlah 67.592 orang dengan capaian 9,68 % artinya terjadi penurunan. Sedangkan ditahun sebelumnya 2018 adalah sebanyak 11.870 orang terhadap PUS sejumlah 65.998 orang dengan capaian 17,99%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun mengalami penurunan peserta KB yang tidak terlayani karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin menurun maka semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.6  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang Belum terlayani (Unmet Need) 2018-2021

TAHUN	PUS	UNMET NEED	CAPAIAN (%)
2018	65.998	11.870	17,99
2019	67.592	6.541	9,68
2020	72.532	5.125	7,06
2021	78.566	5.358	6,08

Gambar 3.2

Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani (Unmet Need) Tahun 2018-2021





### Jumlah Akseptor KB Baru

Akseptor KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.

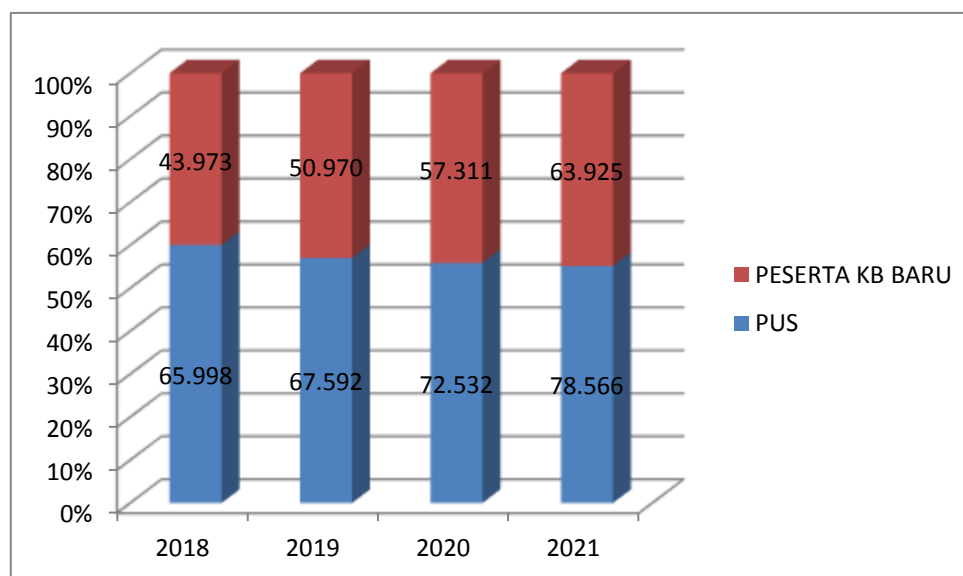
Akseptor KB baru pada tahun 2021 mencapai 63.925 mengalami kenaikan 6.614 orang akseptor baru dari tahun sebelumnya. 2020 mencapai 57.311 mengalami kenaikan sebanyak 6.341 akseptor. Tahun 2019 sebanyak 50.970 Akseptor. dan Akseptor KB baru pada tahun 2018 mencapai 43.973 Akseptor. dari tahun ke tahun mengalami peningkatan peserta KB Baru. Karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin meningkat maka semakin baik**. Tren ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pelayan KB di Kecamatan.

Perkembangan jumlah akseptor KB baru dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.7  
Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Terhadap PUS  
Tahun 2018-2021

TAHUN	PUS	AKSEPTOR KB BARU
2018	65.998	43.973
2019	67.592	50.970
2020	72.532	57.311
2021	78.566	63.925

Gambar 3.3  
Grafik Perkembangan jumlah Akseptor  
KB Baru Tahun 2018-2021



### Peserta KB aktif MKJP

PUS peserta KB aktif MKJP adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi :

1. MOW (Metode operasi Wanita) atau Tubektomi (tutup kandungan).
2. MOP (Metode Operasi) Pria atau Vasektomi
3. Implan atau Susuk KB dan
4. IUD atau Spiral AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

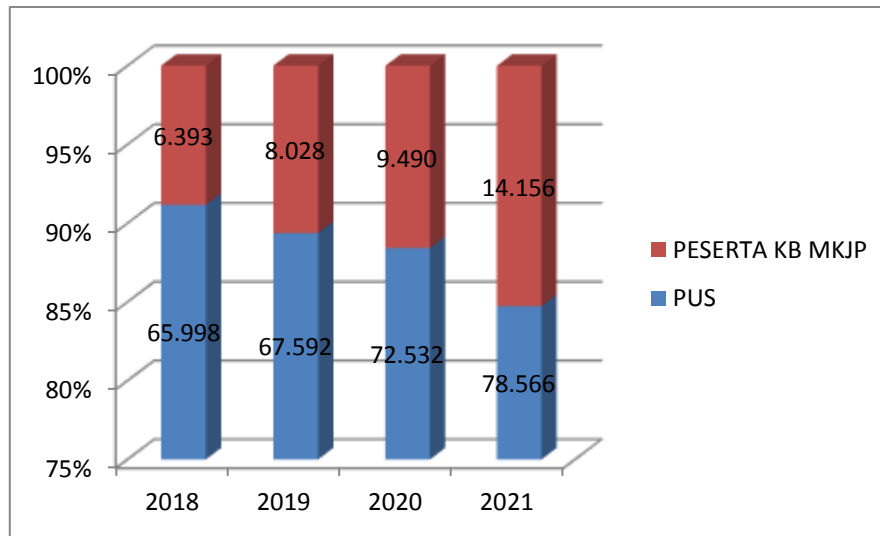
Peserta KB aktif MKJP adalah jumlah peserta KB aktif MKJP dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif MKJP adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi MKJP ditambah dengan jumlah peserta KB baru MKJP pada tahun berjalan.

Peserta KB aktif MKJP pada tahun 2021 sebanyak 14.156 orang mengalami kenaikan sebanyak 4.666 orang dari tahun sebelumnya di tahun 2020 sebanyak 9.490 Akseptor. Pada Tahun 2019 sebanyak 8.028 Akseptor dari tahun sebelumnya 2018 sebanyak 6.393 Akseptor. Hal ini menunjukkan tren kenaikan. Hasil perhitungan angka **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.8  
Perkembangan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi  
Jangka Panjang (MKJP) Terhadap PUS Tahun 2018-2021

TAHUN	PUS	PESERTA KB AKTIF MKJP
2018	65.998	6.393
2019	67.592	8.028
2020	72.532	9.490
2021	78.566	14.156

Gambar 3.4  
Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Terhadap PUS  
Tahun 2018-2021



#### **Peserta KB aktif dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1)**

PUS menjadi peserta KB aktif dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) adalah pasangan suami istri yang sah dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

Dengan adanya 43 kampung KB di wilayah Kaabupaten Polewali Mandar, maka pelayanan KB dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) ini dapat dijangkau secara merata karena keterpaduan Instansi dan stakeholder beserta petugas KB dilapangan bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin

Peserta KB Aktif dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) pada tahun berjalan.

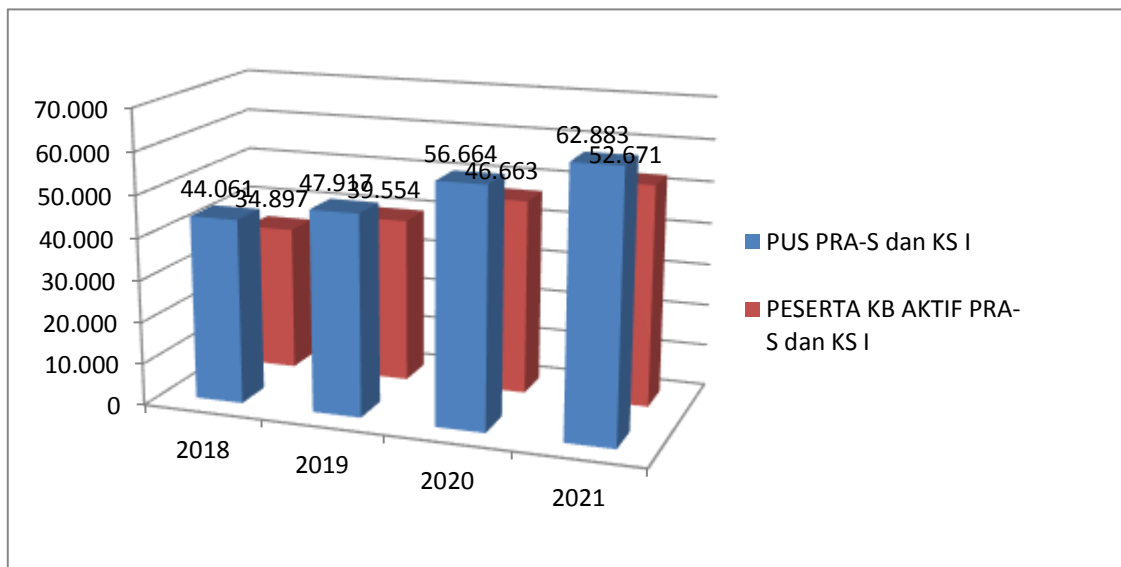
Peserta KB aktif dari keluarga miskin (Pra-S dan KS 1) pada tahun 2021 sebanyak 52.671 akseptor terhadap 62.883 PUS Pra S dan KS I meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2020 yaitu sebanyak 46.663 terhadap Jumlah PUS Pra S dan KS I sebanyak 56.664 orang. Tahun 2019 sebanyak 39.554 Akseptor atau meningkat sebanyak 4.657 Akseptor dari tahun sebelumnya 2018 sebanyak 34.897 Akseptor. Dan di tahun 2017 sebanyak 26.569 Akseptor. Hal ini disebabkan dengan semakin membaiknya pembinaan dan penyuluhan di lapangan, ini

menunjukkan tren kenaikan karena hasil perhitungan angka semakin tinggi semakin baik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.9  
Perkembangan Peserta KB Aktif Dari Keluarga Miskin  
(Pra-S dan KS I) Tahun 2018-2021

TAHUN	PUS PRA-S dan KS I	PESERTA KB AKTIF PRA-S dan KS I	CAPAIAN (%)
2018	44.061	34.897	79,20
2019	47.917	39.554	82,5
2020	56.664	46.663	82,3
2021	62.883	52.671	83,7

Gambar 3.5  
Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif Dari Keluarga Miskin  
(Pra-S dan KS I) Tahun 2018-2021



### Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

PLKB/PKB adalah petugas BKKBN berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Bangga Kencana (KKBPK).

Masing-masing bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat desa/kelurahan.

Status kepegawaian PKB/PLKB dapat dianalogikan sebagai orang yang pergi dan pulang (PP). Semula berstatus sebagai pegawai pusat (vertikal) dan setelah adanya otoda maka jabatan ini masuk dalam formatur PNS Pemkab tetapi sejak tahun 2017 statusnya dikembalikan ke PNS Pusat dibawah naungan BKKBN

PLKB yang ada di daerah/Kabupaten, diberdayakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar. PKB/PLKB ini mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB di Lapangan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penggerakan di lapangan ini dilaporkan ke Pusat melalui BKKBN Perwakilan provinsi Sulawesi Barat.

Jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten polewali Mandar belum memadai. Hal ini mengemuka dari kekurangan tenaga penyuluh KB yang terjadi di desa di 16 Kecamatan yang ada.

Idealnya satu penyuluh untuk dua desa. Namun, saat ini satu penyuluh untuk 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) desa.

Kurangnya tenaga penyuluh KB sudah berlangsung sejak dimulainya era desentralisasi pada tahun 2003. Saat itu, penyuluh KB di Indonesia mencapai 26 ribu. Namun, saat ini hanya 15 ribu orang.

Jumlah desa dan Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar adalah 167 sementara PLKB sekarang sejumlah 20 orang dan itulah dikatakan penyuluh KB masih terhitung belum memadai.

Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2021 di semua wilayah kerja Kecamatan sudah terisi Koordinator PLKB sehingga jumlahnya kembali menjadi 23 orang termasuk PLKB. Dengan Asumsi bahwa setiap penyuluh KB membawahi 2 Desa/kelurahan belum mencukupi rasio petugas KB di kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 167. Rasio petugas KB di kabupaten Polewali Mandar saat ini adalah 1 : 8 dimana setiap penyuluh KB membawahi 8 sampai 9 desa/kelurahan. Kekurangan Petugas Lapangan KB ini sangat berdampak terhadap penggerakan dan penyuluhan di lapangan karena tapi dengan adanya Penerimaan Kuota PLKB lewat jalur PPPK tahun 2021 senyak 43 orang yang lolos maka diharapkan kendala yang selama ini dialami mengenai kekurangan tenaga PLKB akan bisa teratasi. Standar Rasio petugas KB di Indonesia adalah 1:2 dimana seorang petugas KB membawahi 2 desa/kelurahan.

Tabel 3.10  
Daftar Nama-nama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Wilayah Kerja Kabupaten Polewali Mandar 2021

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	Yahya, S.Pd.I.	Kecamatan Polewali
2	Aisyah	Kecamatan Polewali
3	Pitri	Kecamatan Binuang
4	Ahmad K, SHI.,M.Si	Kecamatan Anreapi
5	Andi Suarni, SH	Kecamatan Matakali
6	Juliadi, S.Sos.I	Kecamatan Wonomulyo
7	Irwan, S.Sos.I	Kecamatan Tapango
8	Hikmah	Kecamatan Mapili
9	Muh. Akdam WJ, S.Sos.I	Kecamatan Bulu
10	Pirman, S.Pd.I	Kecamatan Matangnga
11	Ridwan Hilal, S.Ag.,M.Si	Kecamatan Luyo
12	Alamsyah, S.Sos	Kecamatan Tubbi Taramanu
13	M. Irham, S.Sos	Kecamatan Campalagian
14	Indrajaya, SH	Kecamatan Campalagian
15	Haeriah Waris	Kecamatan Balanipa
16	Purnama Dewi, S.Sos	Kecamatan Balanipa
17	Andi Istianah Rahman, SH.,MH	Kecamatan Tinambung
18	Asyari Atjo	Kecamatan Tinambung
19	Sauki, SH	Kecamatan Limboro
20	Anwar, S.Pd.I	Kecamatan Alu
21	Haeriah Waris	Kecamatan Balanipa

### **Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1**

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs). Indikator tahapan KS I atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs), yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga *makan dua kali* sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki *pakaian yang berbeda* untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai *atap, lantai dan dinding* yang baik, (4) Bila ada anggota keluarga

sakit dibawa ke sarana kesehatan, (5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi dan (6) Semua anak umur 7 – 15 tahun dalam keluarga bersekolah. Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator KS II atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga, yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, (4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah, (5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing, (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, (7) Seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin, (8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

BKKBN hanya melaksanakan pendataan pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Tidak melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi kemiskinan atau menurunkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Melakukan pemantauan terhadap pendataan keluarga dan pelatihan bagi pendata (PPKBD/Sub PPKBD), hal yang diambil sehingga pendataan menghasilkan data yang akurat.

Kendala-kendala tersebut Pembangunan Bangsa Kencana di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- a. Peserta KB aktif dari tahun ke tahun masih didominasi perempuan, kesertaan ber-KB laki-laki masih kurang;
- b. Peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang;
- c. Kurangnya advokasi, konseling dan penyuluhan tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- d. Kurangnya tenaga terlatih untuk kontrasepsi MKJP;
- e. Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB;

Langkah-langkah yang diambil oleh DP2KBP3A, adalah :

- Melakukan advokasi melalui motivator KB pria.

Motivator KB pria merupakan seseorang yang telah menjadi peserta KB pria yaitu vasektomi. Motivator tersebut mengajak orang lain untuk ikut dengan menceritakan pengalaman yang dirasakan setelah di vasektomi.

Akhirnya, pada tahun 2018, Kabupaten Polewali Mandar menjadi Terbaik I pencapaian KB Pria melalui Vasektomi terbanyak di Kecamatan Tutar dan Luyo Motivator KB Pria Terbaik.

- Melakukan pelayanan gratis baik secara mobile (melalui mobil pelayanan) maupun statis di puskesmas dan pengadaan alat kontrasepsi MKJP;
- Melakukan advokasi melalui pemutaran film tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- Melakukan advokasi dan penyuluhan bahwa program KB bukan hanya alat kontrasepsi atau kuantitas penduduk tetapi juga menyangkut kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga;
- Mengusulkan bidan atau dokter untuk mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi khususnya MKJP;
- Guna mengantisipasi kurangnya penyuluh KB, maka diangkat PLKB Sukarela dan untuk meningkatkan kualitasnya diikutkan LDT (Latihan Dasar Tehnis) khusus Non PNS yang dilaksanakan oleh BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat

#### KEGIATAN OPERASIONAL TIM KB KELILING (TKBK)



TKBK merupakan suatu kegiatan dalam bentuk pelayanan KB secara gratis kepada warga dan menjadi salah-satu upaya jitu mengendalikan tingkat kelahiran penduduk. Dalam pelayanannya, DP2KBP3A menyediakan secara gratis alat KB berupa pemasangan pemasangan Intra Uterin Device (IUD), Implant / Susuk KB, Suntik dan Pil. Dalam kegiatan itu pula diberikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga secara baik. Perencanaan keluarga ditujukan agar keluarga dapat menjadi keluarga sejahtera dan masing-masing anak mendapat perhatian serta kasih sayang yang seharusnya dari orangtua.

Penggunaan alat kontrasepsi turun sampai 47 persen selama pandemi. Kondisi itu dapat membuat angka kehamilan yang tidak direncanakan meningkat sehingga terjadi ledakan



penduduk. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) menyebut, dibanding tahun 2019, terjadi penurunan lebih dari satu juta layanan Keluarga Berencana (KB) selama Januari – Desember 2021. Itu sebabnya, masa normal baru setelah meredanya pandemi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali pelayanan KB. “Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia tumbuh seimbang. Namun, selama pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB cukup besar,” kata Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam acara webinar “Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal”. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi. Selama masa pandemi muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan (Bidan Praktek Mandiri) atau dokter yang ada di Klinik KB yang tersebar diseluru wilayah. Di bawah ini adalah uraian pelayana Operasional TKBK di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan frekwensi di Masa Pandemi tahun 2021

Tabel 3.11  
Frekwensi Operasional Tim KB Keliling  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Frekwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota	0	0	0	0
2	Frekwensi Rakor Program KB Tingkat Desa/Kabupaten	16	16	15	15
3	Frekwensi Rakor program KB tingkat Kabupaten/Desa	140	140	123	123
4	Frekwensi penyuluhan oleh PLKB/PKB	143	143	134	143
5	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KB	137	130	118	107
6	Jumlah tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif membuka KIE KB	34	34	27	40
7	Frekwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/kelurahan	100	100	82	62
8	Frekwensi Opersional <b>Gerak Muyan KB</b> dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	0	0	0	0

### Pembinaan TRIBINA

Pembinaan ketahanan keluarga berbasis Tribina yaitu BKB, BKR, BKL dikampung kb yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Polewali Mandar. Pembinaan atau sosialisasi kelompok tribina bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader tentang tribina yang meliputi Bina Keluarga

balita, bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia dimana acara ini berlangsung menjelaskan tentang tujuan, fungsi dan manfaat dari dibentuknya tribina tersebut. dan diharapkan para kader memahami bagaimana mengisi data dalam buku tribina dan dapat memberikan penyuluhan dengan baik serta tepat sasaran.

adapun kegiatan ini memberikan informasi kepada kader-kader tribina, diantara nya :

BKB : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKB

BKR : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKR

BKL : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKL

Dengan demikian para peserta dan kader dapat mengetahui secara rinci tentang kegiatan tribina dan dapat membantu bekerjasama dalam kegiatan program KB.

### **1. Cakupan sasaran anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB**

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga

Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada tahun 2018, 2019 melampaui target. Upaya Ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan antusiasme kader dikalangan bawah sampai di desa dan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan cenderung stagnan disebabkan oleh Pandemi Covid19. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel. 3.12  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina  
Keluarga Balita ber-KB Tahun 2018-2021

#### **I. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKB**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
----	--------	------	------	------	------

(1)	(2)	(3)			
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	5317	5326	3521	5321
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	4249	4262	4262	4249
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	3339	3330	3330	3330
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	3655	3655	3655	3655
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	2783	2883	2783	2783
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	3228	3223	3248	3248
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	2433	2533	2433	2433
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	88	88	90	88
9	Jumlah anggota yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KAA	2045	2078	2002	2002

### **Sasaran anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB**

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spritual. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.

Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKR terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Tahun 2021 belum ada peningkatan sama sekali dan terlihat Stagnan dengan tahun 2020 yang mengalami peningkatan yang bagus karena

capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dan 2018. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang semakin tinggi semakin baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel. 3.13  
Perkembangan Anggota Bina Keluarga Remaja  
ber-KB Tahun 2018-2021

## II. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKR

NO (1)	URAIAN (2)	2018 (3)	2019	2020	2021
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	781	1129	1144	1144
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	423	693	693	693
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	290	445	445	445
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	362	595	595	595
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	314	524	523	523
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	340	500	488	488
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	307	454	454	454
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	15	17	17	17

### 3. Sasaran anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraan mereka bisa meningkat.

BKL mempunyai dua sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga yang semua anggotanya merupakan kaum lansia. Sedangkan sasaran tidak langsungnya, yang pertama adalah perorangan seperti guru, ulama atau pemuka agama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi dan para ahli yang memiliki ketrampilan di bidang psikolog, perawatan, kebidanan, dan dokter. Kemudian, yang kedua adalah lembaga pemerintah maupun swasta, seperti sekolah, organisasi perempuan, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pembinaan anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKL terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Pada tahun 2021 ini jumlah anggota BKL mengalami **penurunan drastis** dari tahun sebelumnya di tahun 2020 penurunan ini disebabkan kurang optimalnya penyuluhan ditingkat kecamatan yang belum jelas penyebabnya. Tapi tahun 2020 capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dan 2018. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.14  
Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Tahun 2018-2021

### III. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKL

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	1084	1567	1567	1380
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	856	1300	1315	1128
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	407	590	590	580
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	627	936	940	832
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	556	788	795	730
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	585	835	824	727
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	529	705	677	612
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	18	18	18	18

#### IV. PEMBINAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA (UPPKS)

Gambar 3.6  
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UPPKS



UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekelompok anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

#### Tujuan UPPKS:

1. Mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif
2. Mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga
3. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga
4. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

#### Anggota UPPKS:

1. Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Peserta Keluarga Berencana (KB)
3. Remaja
4. Lanjut usia

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berupaya mendukung, mengajak, memfasilitasi dan mendampingi para anggotanya dalam memanfaatkan segala sumber daya lokal (bahan baku, keahlian / kemampuan anggota, permintaan pasar, sumber pembiayaan dan lain-lain) untuk kegiatan pembelajaran serta meningkatkan kegiatan ekonomi produktif.

Pembinaan PUS peserta KB menjadi anggota usaha peningkatan dan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) pada tahun 2021 ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun

2020. Ini sepertinya tidak adanya upaya sama sekali PLKB dalam meningkatkan capaian padahal segala macam sarana dan prasarana telah disiapkan dan tinggal di aplikasikan. Penurunan terjadi sejak tahun sebelumnya di tahun 2019 dan 2018 karena Pandemi Covid19 tapi dengan membaiknya situasi diharapkan akan meningkat ditahun tahun mendatang tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Untuk perkembangannya bisa dilihat di table berikut ini.

Tabel. 3.15  
Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB  
Menjadi Anggota UPPKS Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota yang menjadi kelompok UPPKS :				
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	720	855	838	838
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I	630	674	659	659
2	Status KB anggota kelompok UPPKS:				
	a. Anggoa dari seluruh anggota tahapan KS				
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	540	572	552	552
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	405	433	415	415
	b. Anggota dari tahapan KPS dan KS I				
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang status PUS	437	469	451	451
2) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KSI yang status PUS ke KB	328	357	340	340	
3	Jumlah pertemuan anggota UPPKS	27	26	22	22

### **Pembinaan PUS berusia < 20 tahun (PUSMUPAR)**

Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun (PUSMUPAR) , antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya

berusia dibawah 20 tahun. Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 5,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah.

Ini juga disebabkan karena kurangnya upaya advokasi dan KIE program KKB oleh petugas lapangan KB.

### **Kelompok PIK Remaja**



Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Ruang lingkup PIK Remaja meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi KRR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja.

PIK Remaja dapat melayani remaja lainnya yang berada di luar lokasi wilayah administrasinya. PIK Remaja dalam penyebutannya bisa dikaitkan dengan tempat dan institusi pembinaanya seperti PIK Remaja Sekolah, PIK Remaja Masjid, PIK remaja Pesantren, dan lain-lain. Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum



standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik sebaya dan konselor sebaya.

### **Kelompok PIK Mahasiswa**

Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Mahasiswa) adalah suatu wadah kegiatan program KKB yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana termasuk Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tujuan umum dari PIK Mahasiswa adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi mahasiswa. Sedangkan tujuan khususnya antara lain: 1) membentuk Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) di kampus; 2) meningkatkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) dari tahap Tumbuh menjadi tahap tegak dan tahap Tegar; serta 3) Mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) sebagai pusat unggulan (center of excellence) Ruang lingkup PIK Mahasiswa meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi PKBR, TRIAD KRR (Seksualitas, Npsza, HIV dan AIDS), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat mahasiswa.

Pengelola PIK Mahasiswa adalah mahasiswa yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Mahasiswa serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau pihak lain. Pengelola PIK Mahasiswa terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran 2 meningkatnya pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi, yaitu : belum mencapai target 1 indikator, mencapai target 1 indikator dan melampaui target 3 indikator. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Dalam pencapaian indikator terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi , intervensi melalui program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.16

Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator  
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif Tahun 2021

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana,</b>	<b>5,875,427,000</b>	<b>5,769,254,464</b>	<b>99,88</b>
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5,808,427,000	5,702,335,064	98,17
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	33,890,000	33.809.400	99,76
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	11,110,000	11,110,000	100
Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	22,000,000	22,000,000	100
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>101,000,000</b>	<b>100,888,500</b>	<b>99,88</b>
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	20,000,000	20,000,000	100

Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	31,000,000	30,999,800	99,9
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	30,000,000	30,000,000	100
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	30,000,000	30,000,000	100

Walaupun sebagian besar indikator di sasaran 2 ini telah melampaui target, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS sulit berkembang karena kekurangan dana pembinaan terkhusus insentif untuk kader;
2. Pusat Informasi Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK R/M) juga masih sulit untuk berkembang malahan sebagian besar kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif;
3. Pernikahan Usia Anak masih tinggi yang berarti pendewasaan usia pernikahan belum terlalu dipahami oleh masyarakat.

Hal-hal yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan dan kendala-kendala, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kerjasama dan dukungan dari stakeholder atau instansi terkait mulai dari tingkat Desa dan Kabupaten;
- Mengintegrasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan instansi terkait;
- Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok dan kader;
- Selain itu, upaya dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, yaitu melalui: (1) Peningkatan akses informasi tentang pendewasaan usia pernikahan, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan,

sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dengan melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pedoman, advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk fasilitasi lainnya, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, PUG dilakukan melalui perencanaan dan kebijakan berperspektif gender organisasi dan institusi. Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu : pendampingan penganggaran dan perencanaan responsif gender (PPRG) ke SKPD dan pelaksanaan evaluasi PUG untuk mengetahui sejauhmana kelembagaan PUG telah memenuhi prasyarat PUG guna predikat Kabupaten peraih “Anugerah Parahita Ekapraya (APE)”

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021 Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.17  
Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Capaian IPG	92,01	92.02	101

Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran 2.1 adalah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah sebagai berikut:

### 1. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

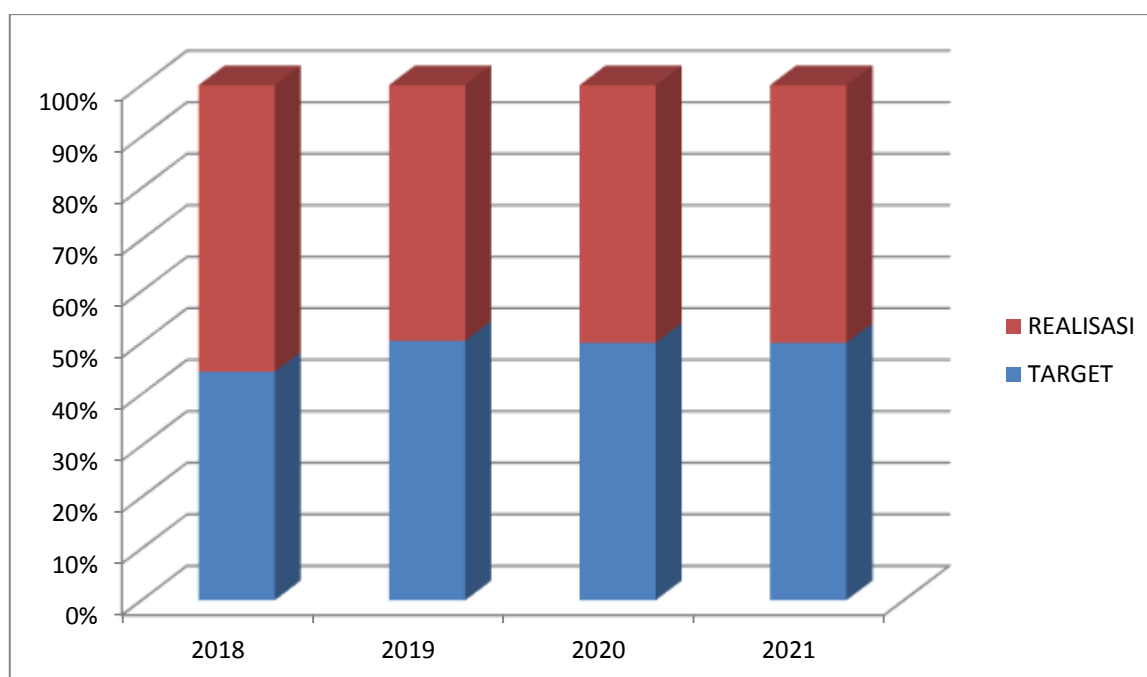
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam

dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Capaian IPG Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2021 ini, target 92,01 % realisasi 92,02% capaian 101%. Data ini diperoleh dan diolah oleh BPS Pusat dengan menggunakan sistem atau aplikasi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel. 3.18  
Perkembangan Target dan Realisasi Capaian  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	71,75	90.02	125
2019	91,48	90.02	98,40
2020	92,01	92.02	101
2021	92,01	92.02	101

Gambar 3.7  
Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2021



Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya data pendukung dan pengetahuan dalam menghitung, sehingga menunggu data dari BPS.

Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu memfasilitasi unit layanan terpadu (P2TP2A), melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi dan advokasi.

## **PREDIKAT KABUPATEN LAYAK ANAK**



Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Tujuan Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan tujuan secara khusus adalah Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

### **Prinsip dalam Pengembangan KLA**

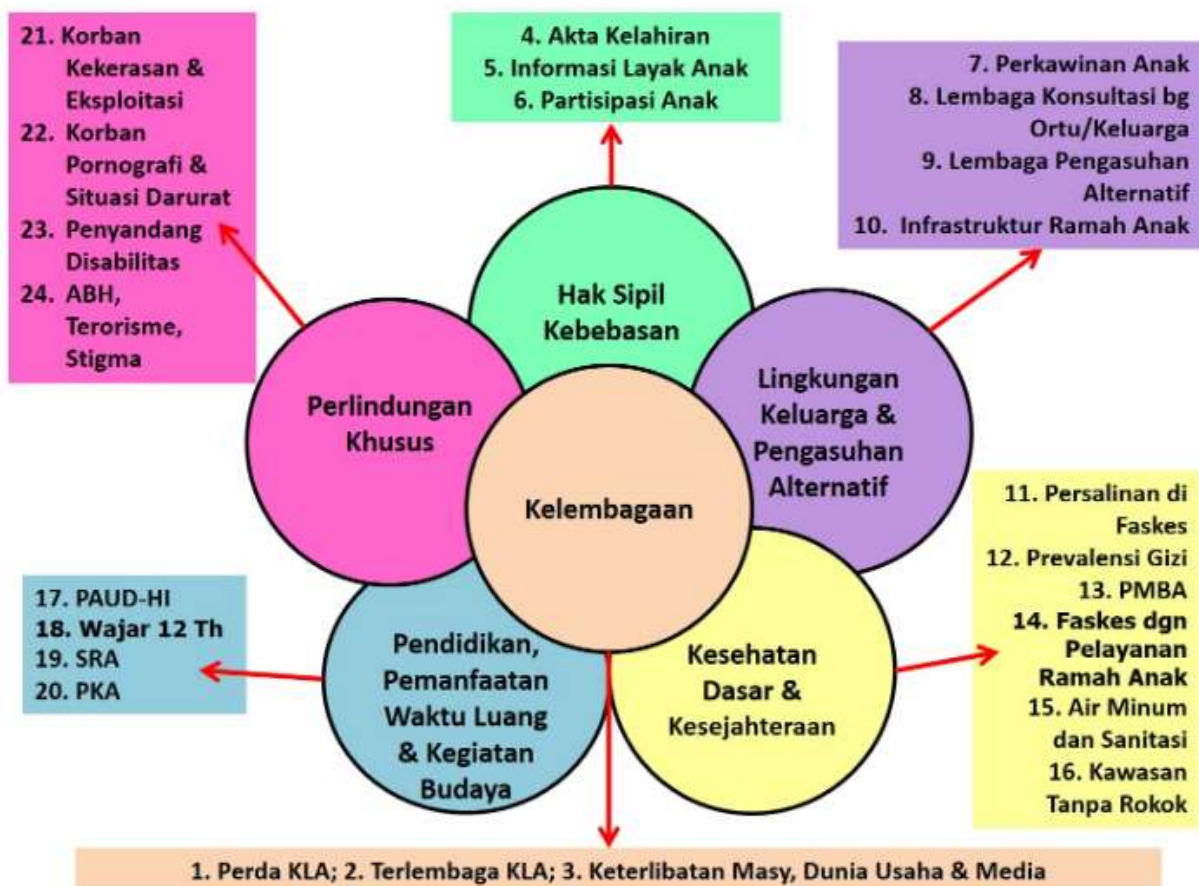
- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

e. Tata Pemerintahan Yang baik

### Strategi Pengembangan KLA

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

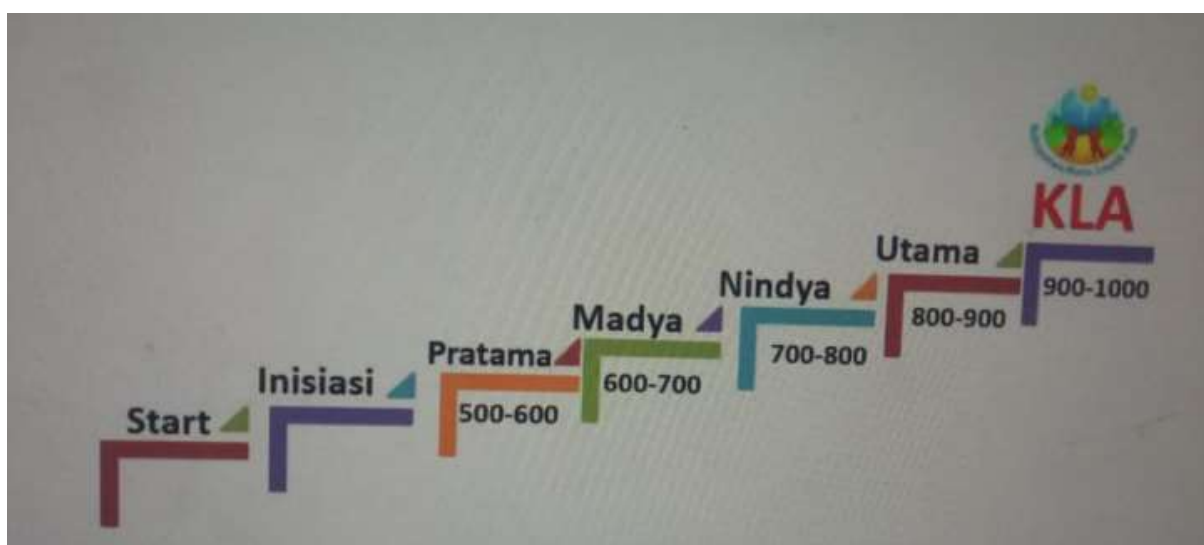
- Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.



Tabel. 3.19  
Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)  
Tahun 2021

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100

Gambar 3.8  
Gambar Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak



Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan/atau di RS. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

Jumlah korban kekerasan anak yang mendapat layanan kesehatan di tahun 2021 ini sejumlah 42 orang dan meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 37 kasus di tahun 2020 dan tahun 2019 sejumlah 54 Kasus dan tahun 2018 sejumlah 90 Kasus Anak. Untuk tahun 2021, mengalami kenaikan 5 Kasus Anak. Hal ini menunjukkan keberhasilan tingkat kriminalitas terhadap Anak. Dari semua Kasus Anak yang ada dapat diselesaikan semua tanpa hambatan

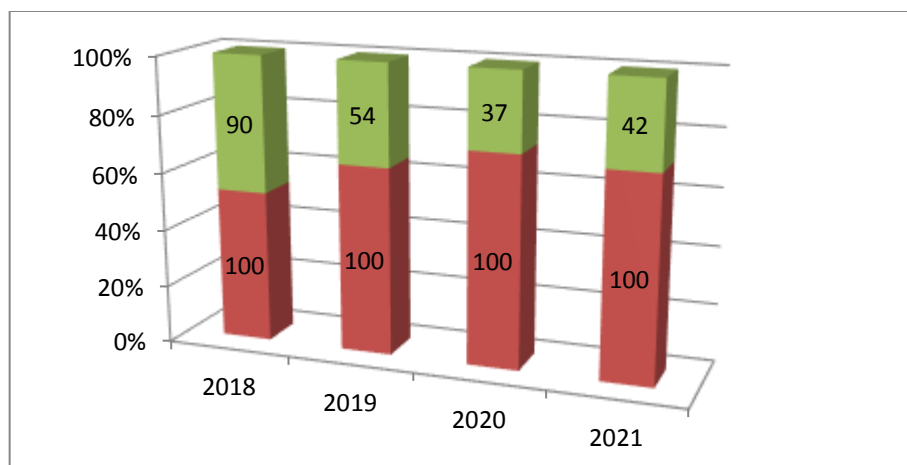


berkat kerja sama yang baik antar petugas P2TP2A. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.20  
Tingkat Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	90
2	2019	54
3	2020	37
4	2021	42

Gambar 3.9  
Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2018-2021



Dalam upaya pencapaian target indikator membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak , yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.21  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Tahun 2021

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>244,240,000</b>	<b>233,715,700</b>	<b>95,69</b>

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20,000,000	19,421,700	97,11
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20,000,000	19,422,300	97,11
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204,240,000	194,871,700	95,41
<b>Program Perlindungan Anak</b>	<b>130,000,000</b>	<b>129,776,700</b>	<b>99,82</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	49,834,100	99,6
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80,000,000	79,933,600	99,92
	<b>374,240,000</b>	<b>363,483,400</b>	<b>97,12</b>

#### 5. Sasaran 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Setjen Wantannas secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh Setjen Wantannas. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survey berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini para stakeholder Setjen Wantannas dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelaksanaan survey IKM yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas yang merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan public.

Untuk Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2021 ini mendapat IKM dengan Prestasi **BAIK**

#### 6. **Sasaran 6** : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada Perangkat Daerah. Data dari luar Perangkat Daerah juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi

wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kabupaten Polewali mandar di Tahun 2021 mendapatkan nilai **BB** dalam penilaian Sakip dari Target yang ditetapkan yaitu Nilai **BB**

#### **7. Sasaran 7 : Opini Pengelolaan Perangkat Daerah**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Di tahun 2021 ini Kabupaten Polewali mandar mendapatkan Opini Audit **WTP** (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sesuai dengan target yang dicanangkan

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagaimana dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah :

- **Belanja Tidak Langsung** : Rp. 2.421.733.808,-
- **Belanja Langsung** : Rp. 6.885.958.000,-
- **Total** : Rp. 9.307.691.808,-

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, dapat dilihat dari uraian dan tabel per sasaran berikut :

**Tabel. 3.22**

### **Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021**

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi</b>					
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>					
Prosentase Peserta KB	Penguatan	Jumlah dan Jenis Layanan	5,808,427,000	5,702,335,064	98,17

Aktif	Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	program KKBPK yang dilaksanakan PKB/PLKB			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE ke kelompok KB	33,890,000	33.809.400	99,76
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Akseptor KB yang dibina	11,110,000	11,110,000	100
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelayanan KB	22,000,000	22,000,000	100
<b>Sasaran 2 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>					
	<b>Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk</b>				
Laju Pertumbuhan Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi	20,000,000	20,000,000	100

Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi	31,000,000	30,999,800	99,9
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	30,000,000	30,000,000	100
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi yang dikelola	20,000,000	19,888,700	99,44
<b>Jumlah</b>		<b>5,976.427,000</b>	<b>5,870,142,964</b>	<b>98,22</b>

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa untuk mencapai target indikator sasaran pada sasaran 1 yaitu mencapai indikator Persentase KB Aktif, dijabarkan kedalam 1 program dan 4 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 5,875,427,000,- dan realisasi Rp. 5,769,254,464,- capaian 98,19%, yaitu : **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** , meliputi :

1. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
4. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Untuk mencapai indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, dijabarkan dalam 1 program dan 4 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 101,000,0000,- dan realisasi Rp. 100,888,500,- capaian 99,88 %, yaitu : **Program Pengendalian Penduduk** meliputi :

1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan .
3. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
4. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Akuntabilitas Keuangan untuk sasaran 3. Menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.23

Akuntabilitas Keuangan Sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender Tahun 2021

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dan meningkatnya Kualitas Hidup Anak</b>					
<b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>					
IPG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta evaluasi PUG	20,000,000	19,421,700	97,11
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	20,000,000	19,422,300	97,11
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	204,240,000	194,871,700	95,41



	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Predikat Kabupaten Layak Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum anak	80,000,000	79,933,600	99,92
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitas	50,000,000	49,834,100	99,6
<b>Jumlah</b>			<b>374,240,000</b>	<b>363,483,400</b>	<b>97,12</b>

Untuk mencapai indikator IPG dan Predikat Kabupaten Layak Anak, dijabarkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 374,240,000,- dan realisasi Rp. 363,483,400,- capaian 97,12%, yaitu : **Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawab dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun anggaran 2021 merupakan media komunikasi pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2021. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) tahun 2021 ditetapkan sebanyak 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja, dengan kategori capaian sebagai berikut :

**a) 7 indikator mencapai target;**

Alokasi dana APBD DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 guna mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran sebesar Rp. 3.214.013.808,- terdiri dari

belanja langsung sebesar Rp. 792.280.000,- dan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.421.733.808,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.852.660.744 atau 99,65 %

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja DP2KBP3A tahun 2021 antara lain :

- Keterbatasan pengetahuan pegawai DP2KBP3A terkhusus eselon II dan III tentang penetapan kinerja OPD;
- Keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan untuk pencapaian beberapa indikator kinerja disatukan/digabung;
- Untuk penyediaan data bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunggu data dari OPD terkait dan BPS;
- Kurangnya koordinasi baik secara internal antar bidang maupun dengan OPD terkait.

Adapun yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja DP2KBP3A tahun 2021, sebagai berikut :

- Menyarankan jangan hanya bagian perencanaan OPD saja disosialisasikan tentang penetapan kinerja tetapi disosialisasikan juga kepada Kepala OPD dan Kepala Bidang/Sekretaris DP2KBP3A selaku pelaksana dan penentu target indikator kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Mengefisienkan anggaran dengan menyatukan dan menggabung beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian beberapa target indikator;
- Terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik secara lisan maupun tulisan guna memperoleh data terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Melaksanakan pertemuan secara intern guna membahas tentang penetapan kinerja dan secara eksternal dengan stakeholder terkait guna mendapat informasi dan data yang terkait.

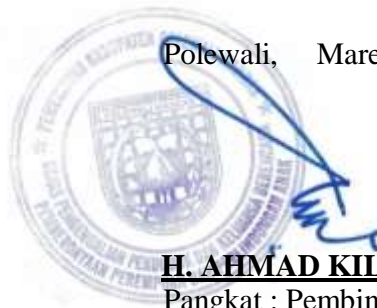
## **Saran**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

Demikianlah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) ini dibuat. Semoga LAKIP DP2KBP3A Tahun 2021 bermanfaat terutama bagi aparatur DP2KBP3A sendiri. Sekian dan Terima Kasih.

Polewali, Maret 2022



**H. AHMAD KILANG, S.Pd. MMA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19681231 198803 1 190